



Banyak Koperasi di Yogya tak Manfaatkan TI

Pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan pengurus mengelola koperasi.

YOGYAKARTA — Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menyebut belum banyak koperasi di kota tersebut yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung manajemen pengelolaan sehari-hari.

"Memang sudah ada yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga memudahkan anggota untuk melakukan pengecekan jumlah simpanan, jumlah iuran yang harus dibayar, utang yang harus dilunasi dan sisa hasil usaha (SHU) yang akan diperoleh. Tetapi, koperasi yang menerapkannya belum banyak," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati, Senin (15/7).

Menurut dia, selain memudahkan anggota untuk mengecek berbagai informasi terkait keanggotaan mereka, pemanfaatan teknologi informasi tersebut juga akan memudahkan pengurus dalam mengelola koperasi dan menunjukkan pengurus koperasi bersikap terbuka terhadap seluruh anggota.

Oleh karena itu, Lucy berharap,

melalui tema Hari Koperasi pada tahun ini yaitu reformasi total koperasi di era industri 4.0 akan membawa pemahaman yang lebih baik ke seluruh pengurus koperasi di Kota Yogyakarta untuk mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen operasional sehari-hari.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut Lucy, terus melakukan kegiatan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kota Yogyakarta termasuk mengenalkan pemanfaatan teknologi informasi meskipun secara sederhana.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah membuka Klinik Koperasi Sehat (KKS). Selain memberikan layanan konsultasi dan pembinaan koperasi berbasis daring, melalui KKS tersebut juga dilakukan pelatihan untuk pengurus koperasi agar melek teknologi.

Melalui pelatihan tersebut, pengurus koperasi bisa melakukan pemutakhiran data keanggotaan, nilai aset, omzet dan modal yang dimiliki secara daring. "Kami juga memiliki anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) untuk menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas SDM koperasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Prabaningtyas mengatakan, jumlah koperasi yang dikelola milenial sudah cukup banyak. "Hampir

separuh dari koperasi yang sudah menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) dikelola oleh kaum milenial," katanya.

Menurut dia, jumlah pengurus koperasi dari kelompok milenial diperkirakan semakin banyak sehingga diharapkan kualitas koperasi semakin baik dari waktu ke waktu.

Sementara itu, Ketua Dekopinda Kota Yogyakarta Iskandar menyebut tantangan utama yang dihadapi pengurus koperasi saat ini adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. "Mau tidak mau, suka tidak suka, pengurus koperasi harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi. Pengurus harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi," katanya.

Hingga saat ini, jumlah koperasi aktif di Yogyakarta tercatat sebanyak 362 koperasi. Sebanyak 130 koperasi sudah menjalani pemeringkatan pada 2018 dengan hasil dua koperasi masuk kategori sangat berkualitas, 92 koperasi cukup berkualitas dan 36 koperasi berkualitas.

Pada tahun ini, juga dilakukan pemeringkatan terhadap 130 koperasi lainnya dan prosesnya sedang berjalan. Hasil pemeringkatan berlaku dua tahun sehingga pada 2020 akan dilakukan pemeringkatan terhadap 130 koperasi yang sudah menjalani pemeringkatan pada 2018.

15 koperasi tak aktif

Sementara itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul menyebutkan sebanyak 15 koperasi di daerah ini tidak aktif sehingga membutuhkan pendampingan agar kegiatan usahanya bisa berkembang.

"Jumlah koperasi di Bantul fluktuatif, saat ini total koperasi ada 347 koperasi, sebanyak 312 di antaranya aktif dan yang tidak aktif ada 15 koperasi," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Bantul, Agus Sulistyana.

Menurut dia, koperasi tidak aktif tersebut bukan berarti organisasi ekonomi yang dikelola kelompok masyarakat itu tidak sehat, hanya saja kesulitan berkembang karena kegiatan unit usahanya tidak berjalan karena berbagai faktor dari internal maupun eksternal.

"Semua sehat, (koperasi) sehat itu kriteria sehat dan cukup sehat, ini hanya tidak aktif tidak bisa berkembang, namun apabila ini nanti tidak sehat bisa kita usulkan maupun rekomendasikan untuk ditutup, ini kami masih melakukan pendampingan," ujarnya.

Pihaknya juga terus mendorong agar koperasi tidak aktif ini bisa melakukan rapat anggota tahunan (RAT) agar persoalan yang dihadapi koperasi bisa dicarikan solusi, agar bisa berkembang dan menyejahterakan anggota yang umumnya berasal dari masyarakat setempat.

■ antara ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005